

## DAMPAK PERKEMBANGAN POLITIK TERHADAP MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Lukman Hakim<sup>1</sup>, Sukarno<sup>2</sup> Minna El Widdah<sup>3</sup>

Email : [lukman\\_hakim8360@yahoo.co.id](mailto:lukman_hakim8360@yahoo.co.id)

### Abstrak

Ketergantungan kepada uluran tangan para penguasa secara ekonomis, membuat lembaga-lembaga tersebut harus sejalan dengan nuansa politik yang berlaku. Keterlibatan para penguasa dalam kegiatan pendidikan pada hakikatnya tidak hanya sebatas dukungan moral kepada para peserta didik, melainkan juga dalam bidang administrasi, keuangan, dan kurikulum. Artikel ini merupakan jawaban betapa besar dan kuatnya pengaruh politik dalam sistem manajemen lembaga pendidikan Islam dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Tulisan ini memuat eksistensi lembaga pendidikan Islam baik berupa pesantren, madrasah, maupun sekolah-sekolah umum yang turut memberikan proses baik guna menyiarkan ajaran Islam. Selain itu, dibutuhkan orientasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang jelas, terarah dan teratur guna mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Di samping itu, tulisan ini juga bicara terkait strategi pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi, mampu menyehatkan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam, bahkan mengantarkan pada kemajuan yang signifikan. Ketiga, artikel ini berbicara tentang fungsi politik institusi pendidikan, di mana setiap lembaga pendidikan menjadi agen-agen sosialisasi politik yang dapat memberikan pembelajaran politik baik dan sehat kepada setiap individu terutama kepada setiap generasi bangsa.

**Kata kunci: Politik, Lembaga Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan Islam**

### A. Politik Pendidikan

Politik dalam bahasa Inggris *politics* yang memiliki arti mengatur ketatanegaraan, strategi, seni atau cara yang mengatur, mengurus negara dan Ilmu kenegaraan<sup>4</sup> Sedangkan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.<sup>5</sup> Kemudian politik pendidikan atau *the politics of education* adalah “kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara penyampaianya”<sup>6</sup> Kajian ini lebih terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana perangkat tersebut akan diarahkan.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana UIN STS Jambi. Disamping mahasiswa PPS UIN STS Jambi yang bersangkutan juga berstatus sebagai guru PAI di SDN 100/IX Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

<sup>2</sup> Dosen Program Pascasarjana UIN STS Jambi.

<sup>3</sup> Dosen Program Pascasarjana UIN STS Jambi.

<sup>4</sup> BN Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2004, hal. 144-5. Lihat juga Imam Yahya, *Gagasan Fiqih Partai Politik dalam Khazanah Klasik*, Semarang: Walisongo Press, 2010, hal. 13.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 bagian 1

<sup>6</sup> M Sirozi, *Politik Pendidikan...*, hlm. ix.

Kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan asumsi dan maksud dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik. Kajian politik pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik Negara dengan isu-isu praktis sehari-hari di sekolah; tentang kesadaran kelas; tentang berbagai bentuk dominasi dan subordinasi yang sedang dibangun melalui jalur pendidikan.<sup>7</sup>

Politik dan pendidikan adalah dua elemen yang penting dalam sistem sosial politik disetiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di Negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik disetiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan.<sup>8</sup>

Di dunia Islam keterkaitan antara politik dan pendidikan terlihat jelas. Sejarah peradaban Islam banyak ditandai oleh kesungguhan para ulama dan *umara* dalam memperhatikan persoalan pendidikan dalam upaya memperkuat posisi social politik kelompok dan pengikutnya. Dalam analisisnya tentang pendidikan pada masa Islam klasik menyimpulkan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, Institusi Politik ikut mewarnai corak pendidikan yang dikembangkan. Keterlibatan para penguasa dalam kegiatan pendidikan pada waktu itu, menurut Rasyid tidak hanya sebatas dukungan moral kepada para peserta didik, melainkan juga dalam bidang administrasi, keuangan dan kurikulum. Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan merupakan salah satu konstalasi politik. Peranan yang dimainkan oleh masjid-masjid dan madrasah-madrasah dalam mengokohkan kekuasaan politik para pemangku kebijakan dapat dilihat dalam sejarah. Di lain pihak, ketergantungan kepada uluran tangan para penguasa secara ekonomis, membuat lembaga-lembaga tersebut harus sejalan dengan nuansa politik yang berlaku.

Diantara lembaga pendidikan Islam yang menjadi corong pesan-pesan politik, menurut Rasyid adalah madrasah Nizhamiyah di Baghdad.<sup>9</sup> Dari analisis masalah yang ada di Madrasah Nizhamiyah ada kesimpulan bahwa kedudukan politik di dalam Islam sama pentingnya dengan pendidikan. Tanpa otoritas politik, syariat Islam sulit untuk ditegakkan, kekuasaan adalah sarana untuk mempertahankan syiar Islam sementara pendidikan bergerak dalam usaha menyadarkan umat untuk menjalankan syariat. Umat tidak akan mengerti syariat tanpa pendidikan. Bila politik (kekuasaan) berfungsi mengayomi dari atas, maka pendidikan melakukan pembenahan dari arus bawah. Perkembangan kegiatan-kegiatan kependidikan banyak dipengaruhi oleh para penguasa dan para penguasa memerlukan dukungan dari institusi-institusi pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Di negara-negara barat kajian tentang hubungan antara politik dan pendidikan dimulai oleh Plato

---

<sup>7</sup> *Ibid...*halm ...X

<sup>8</sup> *Ibid...*Halm...1-2

<sup>9</sup> Madrasah Nizhamiyah didirikan oleh penguasa Bani Saljuk Nizam al-Mulk, seorang perdana menteri dari Alp Arselan dan Malik Syah pada tahun 457 H,

dalam bukunya *Republic*.<sup>10</sup> Walaupun utamanya membahas persoalan kenegaraan buku tersebut juga membahas tentang hubungan antara ideologi dan institusi negara dengan tujuan dan metode pendidikan.

Plato mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalam budaya Helenik, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Dijelaskan bahwa setiap budaya mempertahankan kontrol atas pendidikan di tangan kelompok-kelompok elit yang secara terus menerus menguasai kekuasaan politik, ekonomi, agama dan pendidikan. Plato menggambarkan ada hubungan yang dinamis antara aktivitas politik dan aktivitas pendidikan. Keduanya seakan dua sisi dari satu koin, tidak mungkin terpisahkan. Walaupun sangat umum dan singkat, analisis Plato tersebut telah meletakkan fundamental bagi kajian hubungan Politik dan pendidikan dikalangan ilmuwan generasi berikutnya.

Dalam ungkapan Albernety dan Coombe yang dikutip oleh M. Sirozi, *education and politics are inextricably linked* (pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dipisahkan). Hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (*group attitudes*), masalah pengangguran (*unemployment*), dan peranan politik kaum cendekia (*the political role of the inteligensia*).<sup>11</sup> Kesempatan dan prestasi pendidikan pada suatu kelompok masyarakat dapat mempengaruhi akses kelompok tersebut dalam bidang sosial, ekonomi, politik.

Perbedaan yang signifikan antara berbagai kelompok masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pendidikan dapat dilihat pada distribusi kekuasaan politik dan ekonomi serta kesempatan kerja, khususnya pada sector pelayanan publik. Di negara-negara pasca kolonial, kelompok masyarakat yang mendapat *privilese* pendidikan lebih mampu melakukan konsolidasi kekuatan, lalu muncul menjadi kelompok penguasa yang menguasai partai-partai politik dan sektor pelayanan publik. *Privilese* atau diskriminasi pendidikan bisa terjadi karena alasan-alasan budaya atau agama.

## B. Lembaga Pendidikan Islam

Secara etimologi lembaga adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa lembaga mengandung dua arti, yaitu: 1) pengertian secara fisik, materil, kongkrit, dan 2) pengertian secara non-fisik, non-materil, dan abstrak.<sup>12</sup>

Dalam bahasa Inggris, lembaga disebut *institute* (dalam pengertian fisik), yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, dan lembaga dalam pengertian non-fisik atau abstrak disebut *institution*, yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam pengertian fisik disebut juga dengan bangunan, dan lembaga dalam pengertian nonfisik disebut dengan pranata.<sup>13</sup>

Secara terminologi, Amir Daiem mendefinisikan lembaga pendidikan dengan orang atau badan yang secara wajar mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan. Rumusan

---

<sup>10</sup> Menurut Plato, "para Filsuf memiliki otoritas tertinggi, para pengawas berpendidikan menengah bertindak sebagai kekuatan militer dan polisi, dan mereka memasok kebutuhan ekonomi negara menempati status terendah diantara semuanya. M. Sirozi, *Politik Pendidikan...*, hlm. 6.

<sup>11</sup> M. Sirozi, *Politik Pendidikan...*, hlm. 7.

<sup>12</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), Cet ke.9, hlm. 277.

<sup>13</sup> *ibid*

definisi yang dikemukakan Amir Daiem ini memberikan penekanan pada sikap tanggung jawab seseorang terhadap peserta didik, sehingga dalam realisasinya merupakan suatu keharusan yang wajar bukan merupakan keterpaksaan. Definisi lain tentang lembaga pendidikan adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan relasi-relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum, guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.<sup>14</sup>

Daud Ali dan Habibah Daud menjelaskan bahwa ada dua unsur yang kontradiktif dalam pengertian lembaga, pertama pengertian secara fisik, materil, kongkrit dan kedua pengertian secara non fisik, non materil dan abstrak. Terdapat dua versi pengertian lembaga dapat dimengerti karena lembaga ditinjau dari segi fisik menampakkan suatu badan dan sarana yang didalamnya ada beberapa orang yang menggerakkannya, dan ditinjau dari aspek non fisik lembaga merupakan suatu sistem yang berperan membantu mencapai tujuan.<sup>15</sup>

Adapun lembaga pendidikan islam secara terminologi dapat diartikan suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan islam. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan itu mengandung pengertian kongkrit berupa sarana dan prasarana dan juga pengertian yang abstrak, dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu, serta penanggung jawab pendidikan itu sendiri.<sup>16</sup>

Pendidikan Islam termasuk masalah sosial, sehingga dalam kelembagaannya tidak terlepas dari lembaga-lembaga sosial yang ada. Lembaga tersebut juga institusi atau pranata, sedangkan lembaga sosial adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tepat atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum, guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.

Menurut Pius Partanto, M. Dahlan Al Barry "lembaga adalah badan atau yayasan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, kemasyarakatan dan sebagainya"<sup>17</sup>

Menurut Muhaimin "lembaga pendidikan Islam adalah suatu bentuk organisasi yang mempunyai pola-pola tertentu dalam memerankan fungsinya, serta mempunyai struktur tersendiri yang dapat mengikat individu yang berada dalam naungannya, sehingga lembaga ini mempunyai kekuatan hukum sendiri"<sup>18</sup>

Merujuk dari pendapat di atas lembaga pendidikan Islam adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam bersama dengan proses pembudayaan serta dapat mengikat individu yang berada dalam naungannya, sehingga lembaga ini mempunyai kekuatan hukum.

Pendidikan Islam yang berlangsung melalui proses operasional menuju tujuannya, memerlukan sistem yang konsisten dan dapat mendukung nilai-nilai moral spiritual yang melandasinya. Nilai-nilai tersebut diaktualisasikan berdasarkan orientasi kebutuhan perkembangan fitrah siswa yang dipadu dengan pengaruh lingkungan kultural yang ada.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 278

<sup>15</sup> *ibid*

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> Pius Partanto, M. Dahlan Al Barry, kamus ilmiah populer (Surabaya: Arkola, 1994) hlm. 406

<sup>18</sup> Muhimin, Abd. Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm. 231

## 1. Tujuan Lembaga Pendidikan Islam

Tujuan lembaga pendidikan Islam (madrasah) maka tidak terlepas dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Tujuan pendidikan Islam digali dari nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.

Menurut Muhaimin, "Lembaga pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayalan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat berbangsa dan bernegara".<sup>19</sup>

Lembaga pendidikan Islam mempunyai tujuan untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki manusia itu, mulai dari tahapan kognisi, yakni pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan afeksi, yakni terjadinya proses internalisasi ajaran dan nilai agama ke dalam diri siswa, dalam arti menghayati dan meyakinkannya. Melalui tahapan afeksi tersebut diharapkan bertumbuh motivasi dalam diri siswa dan bergerak untuk mengamalkan dan menaati ajaran Islam (tahap psikomotorik) yang telah diinternalisasikan dalam dirinya. Dengan demikian, akan terbentuk manusia muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia.

## 2. Tugas Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan Islam seperti halnya pada sekolah umumnya, adalah merupakan lembaga pendidikan kedua setelah keluarga. Menurut An-Nahkawi, "Tugas-tugas yang ditambah oleh lembaga pendidikan Islam adalah: 1.) merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip pikir, aqidah dan tasyri' (sejarah) yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bentuk dan realisasi itu adalah agar anak didik beribadah, mentahidkan Allah SWT, tunduk dan patuh kepada perintah dan syariat-Nya. 2.) Memelihara fitrah anak didik sebagai insan yang mulia, agar tidak menyimpang dari tujuan Allah menciptakannya. 3.) Memberikan kepada anak didik seperangkat peradaban dan kebudayaan Islami dengan cara mengintegrasikan antara ilmu-ilmu alam, ilmu sosial, ilmu eksak, dengan landasan ilmu-ilmu agama, sehingga anak didik mampu melibatkan dirinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4.) Membersihkan pikiran dan jiwa anak didik dari pengaruh subyektivitas (emosi) karena pengaruh zaman yang terjadi pada dewasa ini lebih mengarahkan pada penyimpangan fitrah manusia. 5.) Memberikan wawasan nilai dan moral, dan peradaban manusia yang membawa khasanah pemikiran anak didik menjadi berkembang. 6.) Menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antara anak didik. 7.) tugas mengkoordinasi dan membebani kegiatan pendidikan. 8.) Menyempurnakan tugas-tugas lembaga pendidikan keluarga, masjid dan pesantren"

Tugas lembaga pendidikan pada intinya adalah sebagai wadah untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan pelatihan agar manusia dengan segala potensi yang dimilikinya dan dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Tugas lembaga pendidikan Islam yang terpenting adalah dapat mengantarkan manusia kepada misi penciptaannya sebagai hamba Allah sebagai kholifah fi Al-Ardhi, yaitu seorang hamba yang mampu beribadah dengan baik

---

<sup>19</sup> Muhaimin, op.cit., hlm. 127

dan dapat mengembangkan amanah untuk menjaga dan untuk mengelola dan melestarikan bumi dengan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh alam.

### 3. Jenis-Jenis Lembaga Pendidikan Islam

Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir (2008) mengemukakan beberapa jenis lembaga pendidikan islam, yaitu keluarga, masjid, pondok pesantren dan madrasah. Selain yang diungkapkan dari Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir juga akan dipaparkan tentang lembaga pendidikan Islam Majelis Ta'lim dan Perguruan Tinggi Islam (IAIN).

#### a. Keluarga Sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah usrah, nasl, 'ali, dan nasb. Keluarga dapat diperoleh melalui keturunan (anak, cucu), perkawinan (suami, istri), persusuan, dan pemerdekaan.<sup>20</sup> Pentingnya serta keutamaan keluarga sebagai lembaga pendidikan islam disyaratkan dalam al-Quran:<sup>21</sup> Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*". (Q.S. al-Tahrim : 6)

Sebagai pendidik anak-anaknya, ayah dan ibu memiliki kewajiban dan memiliki bentuk yang berbeda karena keduanya berbeda kodrat. Ayah berkewajiban mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya melalui pemanfaatan karunia Allah SWT di muka bumi (QS. Al-Jumu'ah : 10) dan selanjutnya dinafkahkan pada anak istrinya (QS. al-Baqarah: 228, 233). Kewajiban ibu adalah menjaga, memelihara dan mengelola keluarga di rumah suaminya, terlebih lagi mendidik dan merawat anaknya. Dalam sabda Nabi SAW. dinyatakan: "*Dan perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanyai dari pimpinannya itu*" (HR. Bukhari-Muslim).<sup>22</sup>

#### b. Masjid Sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Secara harfiah, masjid adalah "tempat untuk bersujud". Namun, dalam arti terminologi, masjid diartikan sebagai tempat khusus untuk melakukan aktivitas ibadah dalam arti yang luas.<sup>23</sup> Dalam bahasa Indonesia, masjid diartikan rumah tempat bersembahyang bagi orang Islam. Di dalam bahasa Inggris, kata masjid merupakan terjemahan dari kata *mosque*.<sup>24</sup>

#### c. Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Kehadiran kerajaan Bani Umayyah menjadikan pesatnya ilmu pengetahuan, sehingga anak-anak masyarakat Islam tidak hanya belajar di masjid tetapi juga pada lembaga-lembaga yang ketiga, yaitu "*kuttab*" (pondok pesantren). Kuttab, dengan karakteristik khususnya, merupakan wahana dan lembaga pendidikan Islam yang semula sebagai lembaga baca dan tulis dengan sistem halaqah (sistem wetonan). Pada tahap berikutnya kuttab mengalami perkembangan pesat karena didukung oleh dana dari iuran masyarakat serta adanya perencanaan yang harus dipatuhi oleh pendidik dan peserta didik.<sup>25</sup>

<sup>20</sup> Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Kencana, 2008), Cet ke 2, hlm. 226.

<sup>21</sup> Ramayulis, *Op Cit.*, hlm. 283.

<sup>22</sup> Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Loc Cit.*

<sup>23</sup> Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Op. Cit.*, hlm. 231.

<sup>24</sup> Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm. 102.

<sup>25</sup> Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Op. Cit.*, hlm. 234.

#### **d. Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam**

Madrasah adalah *isim masdar* dari kata *darasa* yang berarti sekolah atau tempat untuk belajar. Dalam perkembangan selanjutnya, madrasah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Adapun sekolah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pada ilmu pengetahuan pada umumnya. Madrasah sebagai lembaga pendidikan merupakan fenomena yang merata di seluruh negara, baik pada negara-negara Islam, maupun negara lainnya yang di dalamnya terdapat komunitas masyarakat Islam.<sup>26</sup>

#### **C. Manajemen Pendidikan Islam**

Manajemen Pendidikan Islam adalah manajemen yang diterapkan dalam pengembangan suatu pendidikan, yang merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan Islam dalam mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Definisi lainnya yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang efektif dan efisien. Manajemen pendidikan lebih bersifat umum untuk semua aktifitas pendidikan pada umumnya, sedangkan manajemen pendidikan Islam lebih khusus lagi mengarah pada manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan Islam. Aspek manager dan leader yang islami atau yang dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam atau berciri khas Islam, harus melekat pada manajemen pendidikan Islam (Muhaimin: 2015).

Dalam manajemen sekolah, secara umum masalah yang dihadapi sekolah antara lain; (1) Administrasi sekolah yang belum dibenahi dengan baik, contohnya data sekolah yang kurang dinamis; (2) *team working* sekolah yang lemah yaitu sebagian pejabat sekolah sulit berkoordinasi dengan para guru dan personal lainnya dalam melaksanakan strategi sekolah; (3) Kurangnya kelengkapan kearsipan sekolah; (4) kurangnya partisipasi masyarakat pada pembangunan sekolah didaerahnya; (5) kurangnya fasilitas dan kelengkapan belajar di dalam kelas; (6) di beberapa daerah kurangnya sumber daya manusia dari masyarakat di sekitar sekolah karena rata-rata tingkat pendidikan masih rendah, akibatnya pola pikir masyarakat lebih mengutamakan untuk bekerja memenuhi nafkah keluarganya, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk memperhatikan pendidikan; (7) kesibukan masyarakat terdidik disekitar sekolah dalam menjalankan aktivitas, sehingga tidak ada waktu luang untuk bersama-sama memikirkan kemajuan sekolah disekitarnya; (8) manajemen sekolah memiliki misi bernuansa bisnis (Sagala: 2017).

Lembaga pendidikan perlu bertransformasi dalam bentuk strategi-strategi pengelolaan, strategi tersebut harus mempertimbangkan kondisi yang riil yang ada dalam lembaga pendidikan Islam, tuntutan-tuntutan masyarakat di masa depan, tuntutan-tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, persaingan yang makin ketat, serta strategi tersebut harus operasional atau dapat dipraktekkan secara langsung dilapangan. Strategi lembaga pendidikan Islam baik berupa pesantren, madrasah, sekolah, serta perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut: 1)Merumuskan visi, misi dan tujuan lembaga secara jelas serta berusaha mewujudkannya melalui kegiatan yang riil sehari-hari. 2)Membangun kepemimpinan yang profesional(terlepas dari intervensi ideologi, politik, organisasi dan mazhab dalam menempuh kebijakan lembaga). 3)Menyiapkan pendidik yang benar-benar berjiwa pendidik sehingga

---

<sup>26</sup> Abuddin Nata, *Op. Cit.*, hlm. 199.

mengutamakan tugas-tugas pendidikan dan bertanggungjawab terhadap kesuksesan peserta didiknya. 4)Menyempurnakan strategi rekrutmen siswa/ santri/ mahasiswa secara proaktif dengan ”menjemput” bahkan ”mengejar bola”. 5)Berusaha keras memberikan kesadaran dalam diri siswa/ mahasiswa bahwa belajar adalah kebutuhan mendasar yang menentukan masa depan mereka. 6)Merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. 7) Menggali strategi pembelajaran yang dapat mengakselerasi kemampuan siswa yang masih rendah menjadi lulusan yang kompetitif. 8) Menggali sumber-sumber keuangan non konvensional dan mengembangkannya secara produktif. 9)Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk kepentingan pembelajaran, terutama ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium. 10)Mengondisikan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menstimulasi belajar. 11) Mengondisikan lingkungan yang islami, baik dalam beribadah, bekerja, pergaulan sosial, maupun kebersihan. 12)Berusaha meningkatkan kesejahteraan pegawai diatas rata-rata kesejahteraan pegawai lembaga lain. 13) Mewujudkan etos kerja yang tinggi dikalangan pegawai melalui kontrak moral dan kontrak kerja.14) Berusaha memberikan pelayanan prima kepada siapapun, baik jajaran pimpinan, guru/dosen, karyawan, siswa/santri/mahasiswa, maupun tamu serta masyarakat luas. 15) Meningkatkan promosi untuk membangun citra. 16) Mempublikasikan kualitas proses dan hasil pembelajaran kepada publik secara terbuka. 17) Membangun jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang menguntungkan, baik secara finansial maupun secara sosial. 18) Menjalin hubungan erat kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan secara maksimal. 19) Beradaptasi dengan budaya lokal dan kebinekaan. 20) Menyingkronkan kebijakan-kebijakan lembaga dengan kebijakan-kebijakan pendidikan nasional.

Selain strategi atau langkah yang harus dilakukan, ada juga beberapa hal yang harus dihindari dalam mengelola lembaga pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut:1) Politik kepentingan. Apapun kepentingannya baik pribadi, kelompok, maupun organisasi tidak diperkenankan masuk dalam lembaga pendidikan Islam, politik yang dibenarkan hanyalah politik pemberdayaan. 2) Kecendrungan bisnis pribadi. Usaha dalam memperoleh laba dari hasil suatu barang dan jasa serta kegiatan lainnya hanya untuk kepentingan lembaga. 3)Pemborosan, baik pemborosan waktu, biaya, tenaga dan strategi. Sebab segala sesuatu harus dilakukan secara efektif dan efisien (Qomar: tt).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan menganalisis sumber-sumber pustaka terkait politik, Lembaga Pendidikan Islam dan manajemen pendidikan Islam . Penelitian ini dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian (jurnal nasional dan jurnal internasional), buku-buku pustaka, dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang terdapat dalam internet. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan tujuan penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

Keterkaitan antara pendidikan dan politik dipahami oleh masyarakat dalam dua Persepsi. Pertama ada kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa pendidikan adalah pendidikan dan politik adalah politik atau antara keduanya terpisah. Kedua ada kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa antara keduanya saling berkaitan. Pendapat mana yang

paling sesuai masih bisa diperdebatkan, pendapat yang pertama mengasumsikan bahwa mencampuradukkan antara pendidikan dan politik akan merugikan pendidikan karena didalam politik terdapat kondisi buruk atau jelek menurut pendapat kelompok masyarakat tertentu. Pendapat kedua cukup beralasan karena politik tidak dapat hanya dipahami dalam arti sempit, perlu diingat bahwa politik dalam arti sempit diartikan sebagian masyarakat sebagai politik dalam percaturan kehidupan berbangsa dimana didalamnya terdapat persaingan antar kelompok atau golongan tertentu untuk memperebutkan suatu kedudukan atau posisi yang diinginkan dengan menghalalkan segala cara. Politik dalam bidang pendidikan sebenarnya ada, sebuah contoh; seorang kepala sekolah SMK yang memutuskan kebijakan tentang pola magang bagi siswa-siswanya, apakah keputusan itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah keputusan politik. Contoh lain adalah peraturan-peraturan tentang pendidikan yang diputuskan pemerintah baik berupa kebijakan atau pedoman sebenarnya merupakan keputusan politik juga.

Hal itu beralasan karena sebelum sebuah peraturan tentang pendidikan diputuskan harus melalui pembahasan yang sangat sengit baik pada lembaga legislatif maupun eksekutif. Kita masih ingat bagaimana Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang tertunda penetapannya untuk waktu yang tidak sebentar hanya karena ada salah satu pasal yang menjadi perdebatan. Di sana terjadi tarik menarik antara berbagai kelompok dan itu merupakan sesuatu yang lazim dalam dunia politik.

Dari sedikit contoh diatas maka dapat kita simpulkan bahwa didalam dunia pendidikan politik juga berperan dan merupakan hal yang krusial bukan sekedar pelengkap saja. Hingga saat ini pandangan masyarakat masih menganggap bahwa hal pokok bagi kemajuan suatu bangsa adalah ekonomi dan politiknya. Hal itu tercermin dari pola pikir politikus kita yang selalu berorientasi pada dua bidang itu. Sangat jarang politikus yang memprioritaskan pada sektor pendidikan dalam agenda politiknya.

Kondisi demikian juga terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, prioritas pembangunan kita masih saja pada sector ekonomi, politik hankam, politik luar negeri dan belum pernah sampai pada wacana untuk memprioritaskan pada sector pendidikan. Hal demikian barangkali juga dipicu oleh pemahaman bahwa pendidikan tidak secara langsung dapat diketahui hasilnya dan memerlukan biaya yang sangat besar sedangkan sektor lainnya bisa dengan cepat diketahui hasilnya.

Pendidikan merupakan sebuah investasi, karena sebagai sebuah investasi tentu hasilnya tidak dapat kita ketahui dengan cepat. Sebenarnya kalau kita mau menengok kebelakang pada masa sebelum tahun 1945 disana kita akan menjumpai banyak tokoh besar yang membangun pondasi bangsa ini, bukankah mereka adalah produk pendidikan yang berkualitas?. Para tokoh terdepan kita saat itu adalah orang-orang yang bersih dan tulus ikhlas mencurahkan segala kempuannya untuk bangsa, apakah pada saat itu terbersit nanti setelah berhasil mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia mereka akan korupsi atau memanfaatkan posisinya?, kami kira tidak terlintas sedikitpun dalam diri mereka. Kondisi yang terjadi saat ini cukup memprihatinkan, dimana terjadi kemerosotan dalam perilaku politik kita.

Mochtar Buchori dalam Sindhunata (2000: 19-20) mengemukakan alasan kemerosotan periode saat ini dalam perpolitikan dalam tiga generalisasi, yaitu:

1. Perbedaan dalam perilaku politik disebabkan oleh perbedaan dalam mutu pendidikan dasar yang mereka terima sebelum mereka memasuki kehidupan politik, generasi Dr. Sutomo hingga Soekarno mendapatkan pendidikan dasar yang sangat kuat yang mampu melahirkan kemampuan dan semangat intelektual yang tinggi dan sebagai bekal yang lengkap dan memadai sebagai landasan kehidupan politik dikemudian hari. Kondisi demikian tidak terjadi paska tahun 1945 dimana terjadi kemerosotan mutu pendidikan kita secara cepat sehingga tidak mampu menghasilkan seseorang yang tangguh dan profesional bukan sekedar figure semata.
2. Perbedaan disebabkan karena politik sebelum kemerdekaan dihuni oleh "*the educated minority*", yaitu kelompok anggota masyarakat minoritas yang mengenyam pendidikan cukup tinggi, sedangkan paska kemerdekaan dunia politik dikuasai oleh golongan masyarakat yang relative kurang terdidik tetapi mampu menggalang dukungan dari masyarakat.
3. Perbedaan dalam *Zeitgeist*, perbedaan dalam semangat zaman antara zaman sebelum kemerdekaan dengan era paska kemerdekaan. Semangat zaman periode 1908-1945 sangat berbeda dengan zaman yang hidup dalam masyarakat kita dalam periode setelah kemerdekaan.

Dari berbagai generalisasi yang disampaikan terlihat bahwa memang bukan sekedar pendidikan yang berpengaruh dalam perkembangan politik tetapi juga ada budaya yang berkembang pada suatu waktu tersebut. Seberapa penting pendidikan dalam pembangunan politik menjadi sebuah pertanyaan yang menarik. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pentingnya pendidikan bagi pembangunan politik yaitu sebagai berikut:

- a. Pendidikan berlangsung pada lingkup formal, non-formal dan informal
- b. Pendidikan melatar belakangi atau sebagai *basic* bagi seseorang dalam kehidupan politik
- c. Kondisi politik yang kondusif dapat diciptakan oleh pelaku-pelaku politik yang professional dan bertanggungjawab.

Aktivitas pendidikan tidak hanya berlangsung pada sekolah-sekolah formal saja, pada saat ini di masyarakat masih menganggap bahwa sekolah adalah segalanya bagi pendidikan anak, padahal kondisinya tidak seperti itu. Jika kemudian mutu lulusan pendidikan formal rendah atau tidak seperti yang diharapkan maka sekolah dan gurunya yang disalahkan. Memang dalam pendidikan formal ditata sedemikian rupa baik kurikulum, fasilitas, tenaga kependidikan, dan sebagainya untuk menunjang aktivitas pembelajaran yang baik. Berbicara tentang kaitan pendidikan dan politik, pada sekolah-sekolah formal kebijakan pendidikan sudah ditetapkan dari pusat walaupun kini sudah melaksanakan otonomi pendidikan. Itulah mengapa dapat dipahami bahwa pendidikan khususnya sekolah dapat menjadi alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya dan juga dapat sebagai suatu tempat penanaman doktri-doktrin tertentu. Apakah ada yang salah dalam pendidikan formal kita sehingga menghasilkan banyak politikus yang rendah moralnya dengan indikator banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang, dan sebagainya.

Pendidikan khususnya pendidikan formal disekolah merupakan tempat transfer pengetahuan tetapi juga sebagai tempat transfer nilai, nilai dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan norma-norma dan segala sesuatu yang baik dimasyarakat. Saat ini banyak siswa sekolah yang sama sekali tidak menaruh hormat pada guru maupun orangtua, hal itu bisa kita lihat dengan sopan santun mereka, jarang ada anak usia sekolah yang lewat didepan orangtua kemudian minta permissi karena mereka dengan cueknya melintas. Pada beberapa dasawarsa terdahulu dimasyarakat kita tatakrma sangat kuat dipegang, tidak ada yang berani membantah orangtua, guru, dan sebagainya tetapi kini orangtua disamakan hanya sebagai teman dan guru demikian pula, padahal harusnya mereka dihormati.

Bagaimana pendidikan dapat menanamkan nilai – nilai yang baik juga memerlukan dukungan semua pihak, diyakini kemerosotan moral salah satunya karena pendidikan tetapi faktor masyarakat dan budaya yang berlaku juga menentukan. Banyak kendala dalam menanamkan nilai

pada anak didik, antara lain:

- a. Nilai-nilai masih dianggap hanya sebagai pelajaran semata, siswa belum menghayati secara benar bahwa nilai-nilai itu merupakan sebuah aktivitas yang melekat dalam dirinya bukan sekedar materi yang bisa dipelajari dan setelah itu dilupakan.
- b. Dukungan masyarakat disekitar anak didik tinggal yang belum maksimal bahkan rendah, penanaman nilai bagi anak dilingkungan pasar atau terminal tentu lebih sulit dibandingkan dengan penanaman nilai bagi anak-anak di pedesaan yang belum terlalu tersentuh perubahan.
- c. Guru kurang menguasai pola penanaman nilai yang tepat, banyak guru-guru kita yang belum dapat menempatkan perbedaan individual dalam diri anak didiknya sebagai sebuah sarana untuk pembelajaran. Guru masih saja menyamaratakan segala yang diberikan kepada siswanya, memang untuk mengetahui karakter dan sifat anak masing-masing banyak kendalanya tetapi secara garis besar pasti guru mengetahui karena ia bertemu setiap hari dengan siswanya.

Demikian kendala yang menghinggapi dalam penanaman nilai bagi siswa-siswa di lembaga pendidikan formal. Apabila pendidikan nilai ini dapat berlangsung dengan baik maka setelah siswa atau anak didik nantinya berada dimasyarakat ia telah memiliki suatu pola nilai yang baik, kondisi demikian juga berlaku dalam kancah politik dimana politikus dengan penguasaan nilai yang baik maka dalam tradisi politiknya ia juga akan menjalankan pola yang baik pula.

Pada pendidikan non-formal atau diluar persekolahan pendidikan politik dapat dilakukan pada aspek penanaman ketrampilan berperilaku yang baik di masyarakat. Kurikulum dalam pendidikan non-formal seyogyanya diarahkan untuk transfer nilai juga. Sedangkan pada pendidikan informal penanaman nilai yang baik sebenarnya banyak terjadi pada tahap ini. Seorang anak atau siswa sekolah dasar hanya 6-8 jam berada di sekolah atau pendidikan formal sedangkan siswa waktu yang lain ada dirumah atau masyarakat. Pendidikan informal terjadi pada keluarga, masyarakat, organisasi, dan sebagainya.

Penanaman nilai pada pendidikan informal lebih mungkin dilakukan, tetapi kendalanya juga lebih besar, antara lain:

- a. Derasnya arus informasi lewat televisi yang secara nyata memberi efek yang kurang baik bagi anak, anak lebih cepat meresapi apa yang mereka lihat dibandingkan apa yang mereka dengar sehingga walaupun segala sesuatu di televisi adalah fiktif mereka akan menerimanya sebagai kenyataan. Kondisi itu mengakibatkan pola tingkah laku anak juga menjadi sedemikian susah dikendalikan dan itu membentuk pola kehidupannya.
- b. Globalisasi informasi lewat internet, sudah tidak ada lagi jarak antara negara di dunia karena lewat internet semua mungkin. Saat ini anak usia sekolah dasar sudah memanfaatkan internet tetapi apa yang mereka lakukan tidak dapat dikontrol, hal itu berkaitan dengan budaya masyarakat yang ada dimana informasi baik dan buruk dari seluruh dunia dapat diketahui saat itu juga.
- c. Orang tua sudah tidak mampu memberi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anaknya, orangtua sudah sibuk untuk mencari uang bagi kehidupan keluarga sehingga mereka kadang sudah kehilangan identitas yang dicontoh bagi anak-anaknya. Guru yang terbaik adalah teladan masih berlaku hingga kini dan itu bukan merupakan slogan kosong belaka. Anak yang selalu melihat teladan orangtua yang baik ia akan tergerak untuk mengikuti pola itu dan itu merupakan keuntungan tersendiri apabila kita dapat mengelolanya.
- d. Lemahnya kontrol orangtua, karena kesibukan orangtua maka pergaulan anak tidak atau kurang terkontrol. Harus disadari bahwa lingkungan merupakan factor dominant yang membentuk perilaku anak, seperti contoh diatas bahwa anak yang hidup di lingkungan terminal mereka akan terbiasa dengan perilaku kasar dan suka eriak-teriak jorok misalnya, ini berlainan dengan anak yang tinggal di pedesaan mereka masih menjunjung tinggi gotong – royong, saling menghargai dan sopan meskipun tidak seluruhnya seperti ini. Kontrol orangtua bukan sekedar penjaga yang secara otoriter mengawasi anak-anaknya tetapi lebih dari itu ia harus mampu memberi argumentasi yang tepat tentang segala sesuatu dalam lingkungan sekitarnya.
- e. Lemahnya kontrol sosial, kehidupan sosial masyarakat kita saat ini adalah masyarakat persaingan sehingga sikut-menyikut merupakan hal yang lazim dijumpai. Kontrol social yang terjadi juga sangat lemah karena intervensi dan pola perubahan sosial yang begitu cepat sehingga kontrol yang diharapkan tidak atau kurang mampu berperan dengan baik. Perangkat hukum yang menjadi penjamin keadilan hingga kini masih sebatas perangkat yang belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terjadi berbagai ketimpangan social sebagai dampak ketidak-adilan di masyarakat, bangsa dan Negara.

Melalui pendidikan yang baik akan menciptakan politikus yang bijaksana atau dalam istilah Mochtar Buchori sebagai *kearifan* yang dapat dicapai lewat berpikir reflektif. Selanjutnya Mochtar Buchori dalam Sindhunata (2000:25) menyampaikan syarat manusia menjadi arif yaitu:

- a. Pengetahuan yang luas (*to be learned*)
- b. Kecerdikan (*smartness*)
- c. Akal sehat (*common sense*)
- d. Tilikan (*insight*), mengenal inti hal yang diketahui
- e. Sikap hati-hati (*prudence, diskrete*)
- f. Pemahaman terhadap norma-norma kebenaran

g. Kemampuan mencernakan (*to digest*) pengalaman hidup.

Kearifan dan kebijaksanaan dapat dibentuk sejak dini dalam diri anak, karena sifatnya yang melekat maka kedua hal itu kurang bisa diukur tingkatannya tetapi dapat dirasakan dan di lihat hasil atau produk yang diperoleh. Selanjutnya berbicara kebijaksanaan kita akan terlintas tentang demokrasi. Perkembangan demokrasi sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Tilaar (2003: 474-476) mengidentifikasi empat masa atau gelombang proses demokrasi, yaitu:

- a. Demokrasi dan Desentralisasi
- b. Demokrasi dan Partisipasi
- c. Demokrasi dan Pemberdayaan, empowerment
- d. Demokrasi dan *Good Governance*

Demokrasi dalam pendidikan lebih ditekankan setelah pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai implikasi otonomi daerah beberapa waktu lampau. Pola – pola demokrasi dalam pendidikan sebenarnya merupakan salah satu bentuk pendidikan politik dimana di dalam demokrasi terdapat

musyawarah, saling menghargai pendapat dan sebagainya. Upaya untuk memperluas dukungan pendidikan terhadap pembangunan politik dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu:

- a. Menyusun kurikulum yang mampu secara komprehensif memberikan manfaat bagi anak didik dalam kehidupan di masyarakat dan politik nantinya.
- b. Menciptakan pola hubungan yang baik antara pendidikan dan politik tetapi dalam koridor pendidikan bukan sekedar politisasi pendidikan.
- c. Membentuk guru yang memiliki kemampuan profesional dan berkarakter kebangsaan sehingga dapat sebagai figure yang baik bagi anak didik.
- d. Penanaman nilai-nilai yang baik sejak dini sehingga kepribadian anak dapat terbentuk secara nyata, tidak ada segala sesuatu yang bersifat instant mampu memberikan hasil yang baik sehingga segala sesuatu harus dipersiapkan sejak dini.

Pembangunan sebagai suatu proses berkesinambungan mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, politik dan sebagainya. John C. Bock dalam Zamroni (2000: 2) mengidentifikasi peran pendidikan sebagai berikut: a) memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, b) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan c) meratakan kesempatan dan pendapatan.

## **Kesimpulan**

Lembaga pendidikan Islam adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam bersama dengan proses pembudayaan serta dapat mengikat individu yang berda dalam naungannya, sehingga lembaga ini mempunyai kekuatan hukum. Pendidikan Islam yang berlangsung melalui proses operasional menuju tujuannya, memerlukan sistem yang konsisten dan dapat mendukung nilai-nilai moral a spiritual yang melandasinya. Nilai-nilai tersebut diaktualisasikan berdasarkan otentasi kebutuhan perkembangan fitrah siswa yang dipadu dengan pengaruh lingkungan kultural yang ada.

Lembaga pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayalan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Tugas lembaga pendidikan pada intinya adalah sebagai wadah untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan pelatihan agar manusia dengan segala potensi yang dimilikinya dan dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Tugas lembaga pendidikan Islam yang terpenting adalah dapat mengantarkan manusia kepada misi penciptaannya sebagai hamba Allah sebagai kholifah fi Al-Ardhi, yaitu seorang hamba yang mampu beribadah dengan baik dan dapat mengembangkan amanah untuk menjaga dan untuk mengelolah dan melestarikan bumi dengan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh alam.

Pendidikan bukan alat politik tetapi politik adalah pendidikan dan sebaliknya pendidikan yang tidak dapat memilih bukan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan negara. (memilih dalam hal ini adalah kebijakan-kebijakan yang sesuai atau bermanfaat bagi individu warga negara). Di sisi lain supremasi hukum dapat tercapai lewat pendidikan, pendidikan politik. Tujuan negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat dengan sistem politik yang berkedaulatan rakyat. Masyarakat Indonesia yang bhineka yaitu terbentuknya masyarakat yang terdidik yang telah memiliki suatu pandangan yang luas (sebagian besar dikota) yang dibentuk oleh pendidikan dan kesempatan. Pendidikan terletak dalam tatanan politik.

### Daftar Pustaka

- BN Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2004, hal. 144-5. Lihat juga Imam Yahya, *Gagasan Fiqih Partai Politik dalam Khazanah Klasik*, Semarang: Walisongo Press, 2010, hal. 13.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 bagian 1.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), Cet ke.9, hlm. 277.
- Sagala, Syaiful. 2017. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Muhaimin. 2015. *Manajemen Pendidikan: Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Qomar, Mujamil. tt. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana.
- Nata, Abuddin. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ramayulis. 2011. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. Ke-9. Jakarta: Kalam Mulia.
- Salahudin, Anas. 2011. *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tafsir, Ahmad. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam Dalam Perspektif Islam*. Cet. K-10. Bandung: Rosda.
- Pius Partanto, M. Dahlan Al Barry, kamus ilmiah populer (Surabaya: Arkola, 1994) hlm. 406
- Muhimin, Abd. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm. 231